

## **ABSTRAK**

Skripsi dengan judul “Peranan Sistem Prosedur Uang Persediaan, Ganti Uang dan Mekanisme Pembayaran Langsung Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar” ini ditulis oleh Henita Septia Ningsih, Jurusan Akuntansi Syariah, NIM 17403163006 dengan dosen pembimbing Dr. Syarifudin Arif Marah Manunggal, M.S.I.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembiayaan yang menggunakan Uang Persediaan dan Pembiayaan Langsung (LS) dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Uang Persediaan (UP) disini digunakan untuk keprluan sehari-hari, lalu Ganti Uang (GU) yaitu merupakan pengisian kembali uang persediaan yang sudah terpakai minimal 50%, sedangkan LS merupakan pembiayaan yang dilakukan secara langsung untuk belanja pegawai dan pembiayaan pada pihak ketiga.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Sistem Prosedur Pencairan Uang Persediaan, Ganti Uang dan Mekanisme Pembayaran langsung di KPPN Blitar ? (2) Bagaimana Sistem Prosedur dan Batasan dalam Pemakaian Dana Uang Persediaan dan Langsung (LS) Pada KPPN Blitar ? (3) Bagaimana Bentuk Laporan Pertanggungjawaban atas Uang Persediaan dan Dana Langsung (LS) yang Sudah Terealisasikan pada KPPN Blitar?

Penelitian ini disusun berdasarkan data lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisisnya, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupa uraian dan gambaran mengenai data-data yang terkumpul dari hasil wawancara dan pengamatan mengenai keadaan yang sebenarnya di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem prosedur pencairan dana uang persediaan, ganti uang, dan pembiayaan langsung memiliki tiga tahap yaitu yang pertama menerbitkan SPP (Surat Perintah pembayaran), yang kedua mengajukan SPM (Surat Perintah Membayar) dan yang ketiga Penerbitan SP2D (Surat Perintah pencairan Dana). Adapun batas dalam penggunaan dana uang persediaan yaitu Rp.50 juta untuk setiap transaksi 1 (satu) barang atau jasa, sedangkan untuk pembiayaan LS tidak ada batasannya. Adapun laporanpertanggungjawabannya dibuat setiap akhir bulan menggunakan aplikasi SAKTI dan untuk laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun harus dinihilkan. Kata kunci : Uang Persediaan, Ganti uang, Mekanisme Pembiayaan langsung.

## ABSTRACT

*Thesis entitled "The Role of Inventory Money Procedure System, Changing Money and Direct Payment Mechanisms at Blitar's State Treasury Service Office" was written by Henita Septia Ningsih, Department of Shariah Accounting, NIM 17403163006 with supervisor lecturer Dr. Syarifudin Arif Marah Manunggal, MSI.*

*This research is motivated by financing using Inventory Money and Direct Financing (LS) within the framework of implementing the State Expenditure Budget. Inventory money (UP) here is used for daily necessities, then Changing Money (GU), that is replenishing inventory money that has been used at least 50%, whereas LS is financing that is done directly for employee expenditure and financing to third parties.*

*The research problem of this study are (1) What is the Procedure for Disbursing Inventory, Changing Money and Direct Payment Mechanisms in Blitar KPPN? (2) What is the Procedure and Limitation System for the Use of Direct and Supply of Funding Funds in the Blitar KPPN? (3) What is the Accountability Report Form for the Supply and Direct Fund (LS) which has been realized in KPPN Blitar?*

*This research was compiled based on field data using a qualitative approach. The research methods used in data collection are observation, interviews and documentation. As for the analysis, researchers used a qualitative descriptive analysis technique, in the form of a description and description of the data collected from the results of interviews and observations about the actual situation on the field.*

*The results showed that in the system of procedure for disbursing funds for inventory money, changing money, and direct financing, there were three stages: the first issuing SPP (Payment Order), the second submitting SPM (Payment Order) and the third issuing SP2D (Disbursing Warrant) Fund. The limit in the use of funds for inventory money is Rp.50 million for each transaction of 1 (one) item or service, while for LS financing there is no limit. The accountability report is made at the end of every month using the SAKTI application and for the accountability report at the end of the year must be nullified.*

*Keywords:* Money Supply, Replace money, Direct Funding Mechanisms.